

KOMUNIKASI KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM TANGGAP BENCANA: STUDI KASUS PENANGANAN BENCANA DI YOGYAKARTA

¹Zein Mufarrih Muktaf

²Budi Santoso

¹*Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, zein@umy.ac.id*

²*Program Studi Ilmu Komunikasi Stisipol Candradimuka, budikopwil2@gmail.com*

¹Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

²Jl. Swadaya, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164

ABSTRAK

Yogyakarta adalah sebuah wilayah di selatan pulau Jawa yang rawan bencana alam. Maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas masyarakat Yogyakarta dalam usaha pengurangan resiko bencana. Permasalahan terjadi saat komunikasi lembaga instansi yang berkaitan dengan penanganan bencana tidak terkoordinasi dengan baik. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana komunikasi koordinasi setiap instansi dalam penanganan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengambilan data menggunakan pendekatan *focus group discussion* (FGD). Kesimpulan dari penelitian adalah kurangnya komunikasi koordinasi antar instansi dalam tanggap bencana di Yogyakarta, dan perlu meningkatkan komunikasi koordinasi antar instansi.

Kata kunci: komunikasi bencana, kerentanan, kooridinasi, bencana, Yogyakarta

ABSTRACT

Yogyakarta is an area in the south of the island of Java that is prone to natural disasters. Then it is necessary to increase the capacity of the Yogyakarta community in the effort to reduce disaster risk. Problems occur because agency coordination in disaster response is not good. This study tries to see how agency coordination in disaster response. The purpose of this research is to find out the problem and how the solution is. This study uses a case study approach with data collection using focus group discussion (FGD). The conclusion of the study is the lack of communication between agencies in disaster response in Yogyakarta. Need to improve communication coordination between agencies.

Keywords: disaster communication, vulnerability, coordination, disaster, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah rawan bencana. Setiap wilayah di Yogyakarta mempunyai potensi bahayanya masing-masing. Kabupaten Gunung Kidul mempunyai ancaman bencana yang terjadi setiap tahun, yakni bencana kekeringan. Kondisi tanah kapur membuat Gunung Kidul sangat rentan terjadi bencana kekeringan. Hingga kemudian Gunung Kidul disebut dengan istilah “batu bertanah, bukan “tanah berbatu” (Suprpto, 2010) Setiap tahun Gunung Kidul menghadapi bahaya kekeringan karena kondisi tanahnya yang gersang. Kabupaten Sleman mempunyai bahaya alamnya (*natural hazard*) yang berbeda, yakni letusan Gunung Merapi, yang pada tahun 2010 meletus, letusan tersebut menewaskan 347 jiwa (Permana, Setyowati, Slamet, Juhadi, 2017). Terhitung dari tahun 1900-an saja Merapi telah erupsi 27 kali dengan 1500 lebih korban tewas (Sulistiyorini, 2001) (Permana, Setyowati, Slamet, Juhadi, 2017). Kabupaten Bantul sebelah selatan kota Yogyakarta mempunyai tingkat bahaya alamnya yang berbeda. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 adalah bukti bahwa Bantul wilayah rawan bencana. Bantul diketahui wilayah yang masuk pergerakan sesar aktif, yang meliputi Depok, Tirtohargo, Ngambangan, dan Gondowulung (Nurwidyanto, Indriana, Darwis, 2007). Gempa bumi 2006 total menewaskan 5500 jiwa. Bahaya alam di Bantul selain sesar Opak juga bahaya tektonik yang datang dari subduksi laut selatan Jawa. Selain gempa, subduksi tersebut juga berpotensi tsunami. Bahaya alam ini secara nyata terlihat dari palung di Jawa selatan yang membuktikan adanya subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia (Indirana, 2008).

Berbeda dengan Gunung Kidul, jika Gunung Kidul kerawanan bencana pada saat musim kemarau, maka kabupaten Kulonprogo sebagian kerawanan bencana adalah tanah longsor pada musim penghujan. Kabupaten Kulonprogo yang berbukit-bukit mempunyai tingkat bahayanya sendiri yakni *rockfall* dan tanah longsor. Rockfall masuk dalam kategori *landslide* atau tanah longsor (Hisbaron, Hadmoko, Samodra, Dalimunthe, Sartohadi, 2010). Kota Yogyakarta mempunyai kerentanan atas bencana yang juga berbeda seperti angin puting beliung, banjir, kekeringan dan epidemi demam berdarah. Selain itu kota Yogyakarta juga sering mendapatkan dampak bencana dari wilayah lain, seperti saat erupsi gunung Merapi kota Yogyakarta dipastikan akan terdampak yakni efek lahar hujan yang mengalir sungai Kali Code. Air hujan akan membawa material erupsi Merapi dan membuat sungai Kali Code menjadi dangkal, dan airnya meluap hingga ke pemukiman (Listyaningsih, Fitria, 2013). Sungai Kali Code adalah salah dari tiga sungai besar yang lewati tengah kota Yogyakarta.

Potensi bencana yang besar di Yogyakarta jelas membutuhkan penanganan yang serius dari segala komponen masyarakat dan pemerintah. Yogyakarta dihadapkan pada

bahaya alam yang bervariasi dan membutuhkan penanganan dari semua lembaga terkait dan juga masyarakat. Namun dari beberapa bencana yang terjadi, dan dari pengamatan yang sederhana, seperti tidak terlihat koordinasi masif antar insitusi yang memang punya tanggung jawab respon terhadap bencana. Ada kemungkinan tidak terjadi adanya koordinasi satu atap terhadap penanganan bencana di Yogyakarta, khususnya pada respon darurat.

Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana koordinasi komunikasi antar insitusi dalam penanganan bencana di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk melihat koordinasi setiap insitusi dalam penanganan bencana di Yogyakarta. Manfaat penelitian ini menjadi masukan terhadap upaya komunikasi koordinasi insitusi penanganan bencana di Yogyakarta.

Bencana adalah peristiwa yang menghasilkan kerusakan yang sangat besar atau hilangnya kehidupan (Tiwari, 2015). Lebih spesifik bencana bisa dipahami sebagai sebuah gangguan fungsi yang serius terhadap komunitas atau masyarakat karena secara luas hilangnya manusia, material, ekonomi dan lingkungan, diluar kemampuan masyarakat atau komunitas untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (UNISDR, 2009). Dalam penanganan bencana dibutuhkan sebuah manajemen. Manajemen bencana meliputi yakni bencana, tanggap darurat, pemulihan pembangunan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan (Nurjanah et al, 2013). Manajemen bencana pada dasarnya seperti siklus yang berputar.

Jika melihat dari konsep manajemen bencana, sepintas cukup sederhana. Namun pada dasarnya dalam penanganan bencana, hal tersebut cukup kompleks. Hal yang selalu menjadi persoalan adalah komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama (Budi, 2012). Karena dalam penanganan bencana entah dalam kondisi darurat, mitigasi maupun kesiapsiagaan, semua tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama setiap elemen masyarakat dalam tanggap bencana maupun penanggulangan bencana.

Komunikasi menjadi hal penting dalam penanggulangan bencana. Komunikasi menjadi bagian dari koordinasi antar lembaga, kampanye, komunikasi stakeholder terhadap masyarakat korban, kerja jurnalistik, dan sebagainya. Lalu apa itu komunikasi bencana? komunikasi bencana adalah efektifitas komunikasi dan peristiwa bencana dan promosi upaya pengurangan resiko bencana termasuk ketidak efektifitasan komunikasi dan termasuk juga kegagalan dalam operasi tanggap bencana (Haddow dan Haddow, 2009). Adapun studi strategi efektifitas komunikasi bencana berangkat pada 5 asumsi kritis, yakni ; a). *Customer focus* yaitu pahami informasi yang mereka butuhkan dan membangun mekanisme komunikasi yang menghasilkan informasi secara akurat dan tepat waktu, b).

Leadership commitment, pemimpin operasi darurat harus mempunyai komitmen untuk bisa berkomunikasi secara efektif, dan harus secara komitmen berpartisipasi secara penuh dalam proses komunikasi, c). *Inclusion of Communication in Planing and Operations*, ahli komunikasi atau bagian komunikasi harus terlibat pada semua kegiatan perencanaan darurat dan operasional agar mampu meyakinkan bahwa komunikasi berjalan sesuai waktunya dan informasi akurat bisa dipertimbangkan, dimana keputusan aksi sedang dipertimbangkan, d). *Situational awareness*, komunikasi yang efektif didasarkan pada waktu yang tepat dalam pengumpulan, analisa, dan penyebaran informasi dari bencana sebagai bagian dari komunikasi efektif, e). *Media Partnership*, Media massa menjadi media paling efektif untuk berkomunikasi secara tepat waktu dalam hal informasi yang akurat kepada publik. Kemitraan dengan media melibatkan pemahaman kebutuhan media, selain itu kita juga mempekerjakan staf yang terlatih yang bekerja langsung dengan media supaya informasi bisa dengan mudah sampai kepada publik (Haddow dan Haddow, 2009).

Pada dasarnya komunikasi bencana adalah bagaimana membangun komunikasi dan informasi efektif sebelum dan sesudah bencana terjadi. Tabel 1 menjelaskan bagaimana komunikasi dan informasi bencana bekerja dalam ruang lingkup manajemen bencana.

Tabel 1. Bentuk komunikasi dan informasi bencana pada siklus manajemen bencana

| Status | Informasi | Komunikasi |
|----------------------------|---|---|
| Saat tidak terjadi bencana | pemetaan resiko untuk aksi mitigasi | Advokasi, membangun kesadaran dan pelatihan |
| Sebelum bencana | Dilakukan pertemuan untuk membangun kebutuhan informasi kemungkinan bencana dan kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana | Melakukan komunikasi terakhir kepada masyarakat atau orang yang paling rentan |
| Saat terjadi bencana | Dilakukan penilaian situasi untuk melakukan tindakan respon yang sesuai | Komunikasi yang dinamis dan tangguh untuk melakukan tindakan cepat |
| Sesudah bencana | Informasi sebagai bagian dari koordinasi dan pertemuan untuk kebutuhan masyarakat | Komunikasi sebagai bagian dalam proses melihat kebutuhan dan cakupan dalam hal bantuan kemanusiaan. |

Sumber : Shaw dan Gupta, 2009

Apa yang dikemukakan oleh Shaw dan Gupta pada tabel 1 yang menjelaskan bahwa dalam komunikasi bencana dipisahkan antara pendekatan informasi dan komunikasi. Pada dasarnya informasi adalah bagian dari komunikasi, dengan informasi manusia bisa berhubungan satu dengan lainnya serta lingkungannya (Ruben dan Steward, 2013). Namun pada konteks yang berbeda informasi terkait dengan data. Data adalah seperangkat hal sifatnya spesifik, terkait dengan fakta objektif atau hasil pengamatan,

berdiri sendiri, fakta tidak mempunyai makna yang hakiki, namun dengan mudah bisa di tangkap, ditularkan, dan diarsipkan atau disimpan (Pearlson dan Saunders, 2010). Sedangkan informasi adalah terkait dengan data yang diberikan sesuai dengan keperluan dan tujuannya (Druker, 1988 : Pearlson dan Saunders, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus menjadi semacam diskusi yang debatable, dikarenakan banyak ilmuwan yang melihat studi kasus secara berbeda. Ada yang menganggap sebagai sebuah pendekatan seperti pandangan peneliti, ada pula yang menganggap sebagai metodologi (Denzin dan Lincoln, 2009). Seperti yang dijelaskan oleh Creswell, bahwa studi kasus adalah sebuah metodologi (Creswell, 2014). Alasan pemilihan menggunakan pendekatan studi kasus adalah karena kajian yang akan diteliti cenderung kasuistik, dan fokus pada sebuah fenomena tertentu yang cenderung unik (kemungkinan jarang dijumpai). Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan. Ciri studi kasus adalah mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus (Yin, 2006). Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus bersifat deskriptif, dan mencoba menelaah kajian awal dalam fenomena koordinasi intitusi respon bencana di Yogyakarta.

Karena kajian ini adalah kajian awal dalam komunikasi bencana terkait komunikasi, koordinasi, informasi dan kerjasama antar instansi penanggulangan bencana, maka peneliti membutuhkan pemetaan masalah terlebih dahulu yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan untuk penelitian selanjutnya. Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan *Focus Group Discussion*. FGD adalah sebuah bentuk diskusi yang diikuti oleh beberapa orang yang dipandu oleh fasilitator. Tema diskusi sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum diskusi dilakukan (Herdiansah, 2013).

FGD dipilih dikarenakan peneliti memerlukan sebuah bentuk wawancara terbuka yang melibatkan banyak orang, supaya dihasilkan jawaban yang bisa langsung diklarifikasi dan ditambahkan oleh sumber yang lain pada saat itu juga. FGD adalah instrumen penggali data yang berorientasi sosial (Herdiansah, 2013:139). Selain itu dengan FGD sumber bisa lebih terbuka, dikarenakan mendapatkan stimulus dari subjek yang lainnya. Pada FGD posisi fasilitator berperan memfasilitasi forum saja, hal ini membuat subjek tidak merasa tertekan, hal ini jelas berbeda dengan menggunakan cara wawancara personal. FGD juga bisa menggali perbedaan pandangan disaat yang bersamaan. Adapun

FGD dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018. Berikut peserta dalam FGD dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Peserta Focus Group Discussion

| Nama | Institusi |
|--------------------|---|
| Eko Nugroho | PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kus Dwi Raharjo | POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Deta Egi D.M | Geografi UGM |
| Yohanis Setitit | Akademisi |
| Prawoto | PMI Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Ariyanto Nugroho | Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta |
| Yoga Nugroho Utomo | Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS) |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengambilan data dengan menggunakan *Focus Group Discussion*, maka dihasilkan temuan sebagai berikut ;

- Pada dasarnya setiap institusi seperti BPBD, PMI, Polisi, Relawan TRS BPBD (Tim Reaksi Cepat BPBD) tidak maksimal dalam koordinasi tanggap bencana.
- Dalam kondisi dilapangan setiap institusi seperti PMI, SAR, BPBD, Polisi, TNI, Relawan dan lain sebagainya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu respon penanggulangan bencana pada setiap institusi sudah baik, hanya saja tidak ada koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana di Yogyakarta.
- Semua lembaga atau institusi cenderung hanya fokus pada *emergency response* bukan pada mitigasi maupun kesiapsiagaan bencana. Koordinasi pada dasarnya bisa mulai dilakukan pada pra bencana. Hal ini yang menjadikan koordinasi antar lembaga atau institusi juga menjadi tidak maksimal.

Berikut adalah hasil *Focus Group Discussion* yang dibagi dalam dua kategori, permasalahan, tanggapan atau respon, dan kesimpulan.

Tabel 3. Hasil dari *Focus Group Discussion*

| Kategori | Permasalahan | Respon/Tanggapan | Kesimpulan |
|---------------------------|--|---|---|
| Koordinasi antar instansi | Secara teori sudah dibuat koordinasi antar institusi, namun dalam prakteknya sangat sulit diimplementasikan. | Perlu melibatkan dinas. Tidak hanya melibatkan lembaga atau institusi penanggulangan bencana. | Perlu meningkatkan koordinasi, komunikasi antar institusi penanggulangan bencana. |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Pada kasus siklon Cempaka, terlihat bahwa setiap insitusi bergerak sendiri-sendiri.</p> | <p>BPBD menjadi payung utama koordinasi. Setiap elemen insitusi penanggulangan bencana mewakili satu orang dalam BPBD sebagai bagian koordinasi.</p> |
| | <p>Seringkali setiap insitusi terlalu bersemangat sehingga melakukan hal atau tindakan diluar tupoksinya</p> | <p>Setiap lembaga atau insitusi disiplin dengan tupoksinya masing-masing.</p> |
| | <p>Dalam kondisi darurat tidak jelas siapa yang memegang kendali.</p> | <p>Seharusnya koordinasi sudah dilakukan pada saat pra bencana.</p> |
| | <p>Setiap insitusi adalah organisasi otonom.</p> | <p>Mencatat kajian sejarah tentang kebencanaan sebagai bagian dari mitigasi bencana.</p> |
| Koordinasi diluar insitusi penanggulangan bencana | <p>Dinas (dinas pariwisata, dinas pendidikan, PLN, dinas pertanian dan peternakan) dan sebagainya) tidak siap dalam kondisi darurat.</p> | |
| | <p>Tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara lembaga dinas dan insitusi atau lembaga penanggulangan bencana.</p> | |
| | <p>Dinas tidak cukup tanggap dalam mitigasi, kesiapsiagaan dan darurat.</p> | |
| | <p>Kajian akademis tidak dibagikan kepada insitusi penanggulangan bencana sebagai pertimbangan</p> | |

respon

Tidak adanya *big data* kajian kesejarahan dan teknis tentang bencana di Yogyakarta.

Sumber : Hasil FGD 15 Oktober 2018

Tabel 3 dibagi dalam 2 kategori utama, yakni koordinasi antar insitusi penanggulangan bencana dan koordinasi penanggulangan bencana diluar insitusi khusus, yakni insitusi kedinasan. Pembagian 2 kategori ini adalah hasil temuan bahwa perlu adanya dua pembagian koordinasi, disebabkan dalam pengalaman bencana seperti erupsi Gunung Merapi dan Siklon Cempaka mitigasi, kesiapsiagaan ataupun darurat, institusi kedinasan tidak bekerja pada kondisi bencana. Ini yang mungkin perlu ada diskusi lanjut terkait dengan koordinasi antar dinas dalam penanggulangan bencana. Untuk permasalahan adalah hal-hal yang terkait dengan permasalahan koordinasi, dan kemudian direspon atau ditanggapi dan diakhiri dengan kesimpulan

Koordinasi menjadi hal yang Utama dalam Penanggulangan Bencana

Peserta dalam forum sepakat bahwa koordinasi adalah masalah utama dalam penanggulangan bencana. Hambatan koordinasi salah satunya karena ego sektoral setiap insitusi. “karena setiap lembaga itu sifatnya otonom”, kata Eko Nugroho dari PUSDALOPS BPBD DIY. Hal ini juga diamini oleh Yoga Nugroho Utomo dari tim Relawan Sleman. Yoga mengatakan bahwa karena otonom itu maka setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Selain itu karena tidak ada koordinasi yang jelas, maka yang terjadi adalah tumpang tindih perintah atau komando. “Semua sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, namun karena tidak ada koordinasi akhirnya tumpang tindih”, kata Kun Dwi Raharjo selaku Polisi, “Saya bagian keamanan maka saat respon bencana saya melakukan hanya pada keamanan saja”, tambahnya.

Yoga sebagai Relawan menjelaskan, bahwa tanggung jawab koordinasi adalah tanggung jawab pimpinan. “Kalo dibawah hanya menjalankan tugas saja, kalo diatas koordinasinya bagus, maka dibawah pasti bagus. *La wong* kita yang dibawah hanya menjalankan tugas kok”, kata Yoga. Kun Dwi juga mengatakan hal yang sama, “kita orang terlatih dalam penanganan bencana, kita akan menjalankan sesuai yang diperintahkan”, memperkuat pendapat Yoga.

Koordinasi menjadi hambatan paling terasa dalam tanggap bencana. Di Yogyakarta banyak yang terlibat dalam penanganan bencana, hanya saja setiap lembaga atau instansi

tidak terkordinasi dengan baik dalam penanganan bencana. Maka yang terjadi adalah tumpang tindih antar lembaga yang membuat ego sektoral menjadi muncul. Hal ini membuat sebuah insitusi akhirnya memakan tugas institusi yang lain.

“sebaiknya BPBD yang memimpin koordinasi, setiap institusi diambil satu untuk bergabung di BPBD untuk mempermudah komunikasi”, saran Eko Pusdalops BPBD DIY. “Bukan BPBD saja yang mengundang, namun inisiatif dalam lembaga yang terkait untuk datang ke BPBD”, tambahnya. Selama ini elemen masyarakat dan lembaga terkait tidak ada yang inisiatif menggabungkan diri dengan BPBD, sebaliknya BPBD mencoba mengundang elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk duduk bersama membuat koordinasi komunikasi antar lintas lembaga dalam penanganan bencana.

Memperlihatkan Ekstistensi Lembaga : Melampaui Tupoksi

Banyak lembaga yang melebihi tupoksinya. Banyak hal yang membuat personal atau lembaga melebihi tuposkinya. Menurut Eko dari PUSDALOPS BPBD DIY biasanya terlalu bersemangat atau karena ingin terlihat eksistensinya, “mungkin karena terlalu bersemangat, dan *kalo* nggak dikerjakan merasa kurang. Padahal itu bukan tugasnya. mungkin ini juga bagian dari eksistensi”. Tantangan yang jelas didepan mata adalah semangat para relawan maupun tim *rescue* disetiap terjadi kondisi bencana. Pada siklon Cempaka misalnya terlihat semua instansi dan komunitas relawan melakukan respon terhadap peristiwa, namun karena terlalu semangat, membuat tugas setiap lembaga respon melebihi apa yang menjadi tugasnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebanggaan pada korpunya. Dengan menggunakan baju seragam, rasa ingin menolong menjadi tinggi, yang akhirnya juga membuat melebihi pekerjaan yang harus dilakukannya.

Kun Dwi Raharjo menjelaskan sesungguhnya lembaga respon bencana sudah dilatih secara profesional untuk melakukan penanganan bencana. Maka pada dasarnya tidak akan ada masalah di lapangan. Hanya perlu disiplin pada tupoksinya masing-masing. Namun karena koordinasi yang tidak jelas, membuat kondisi di lapangan menjadi tidak teratur.

Membuka Komunikasi dengan Insitusi/lembaga/Dinas/Personal diluar Insitusi Penanggulangan Bencana

Hal yang paling krusial saat ini adalah menjalin hubungan dengan institusi kedinasan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata, dan Dinas lain yang sangat mungkin bisa berhubungan langsung jika terjadi bencana.

Yoga sebagai relawan menjelaskan bahwa dalam erupsi freatik 2018 Merapi, Dinas pendidikan tidak mempunyai perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan maupun darurat jika kemudian sekolah-sekolah dikosongkan jika terjadi erupsi. Selain itu, jika terjadi erupsi,

Dinas Pertanian dan Peternakan tidak mempunyai perencanaan dalam melindungi para peternak jika kemudian terjadi erupsi. Karena banyak kasus saat erupsi, peternak dirugikan karena menjual ternaknya murah karena ketakutan jika kemudian erupsi terjadi. Selain itu Dinas Pariwisata juga tidak mempunyai standar prosedural kepada swasta terutama hotel maupun tempat wisata jika terjadi erupsi.

Penanganan bencana juga sulit jika Dinas tidak melakukannya dalam logika manajemen kebencanaan. Pada kasus siklon Cempaka misalnya, saat banyak pohon roboh, pihak Dinas PU tidak mencoba menawarkan kepada relawan untuk membantu. Dinas PU melakukan sendiri seperti menghadapi kejadian biasa, padahal saat itu kondisi sudah masuk dalam kondisi bencana. Hal lain terjadi di Sleman, saat sebuah jembatan roboh, kondisi darurat, namun kondisi kritis tersebut tidak bisa dilakukan respon cepat karena masih terkendala jembatan itu milik pemerintah pusat yang tidak mungkin dilakukan tanggap cepat oleh pemerintah daerah. Hal ini yang pada akhirnya menghambat penanganan bencana secara cepat.

Maka penting adanya membuka komunikasi koordinasi penanggulangan bencana dengan Dinas-dinas yang memang pada dasarnya cukup dekat dengan peristiwa bencana. Membuka komunikasi diskusi bersama dalam membangun hubungan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi kedinasan dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, maka untuk kontribusi keilmuan pada studi komunikasi bencana maka didapat kesimpulan sebagai berikut; *pertama*, bahwa dalam penanganan bencana, khususnya dalam *emergency response* tidak ada koordinasi dalam satu payung komando yang mengakibatkan tumpang tindih di lapangan. *Kedua*, BPBD ditingkat lokal atau BNPB ditingkat nasional sebagai lembaga resmi dalam penanggulangan bencana belum mempunyai perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam kaitan komunikasi bencana (komunikasi, informasi koordinasi dan kerjasama) secara riil dan praktis pada sebelum, saat dan sesudah bencana, khususnya dalam lingkup komando satu arah. *Ketiga*, hambatan koordinasi dikarenakan posisi setiap insitusi bersifat otonom yang mengakibatkan setiap institusi merasa tidak perlu melakukan koordinasi langsung dengan BPBD. *Keempat*, Dinas-dinas yang mempunyai kaitan dengan kebencanaan langsung tidak mempunyai kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, karena itu lembaga dinas pemerintahan seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas pertanian dan peternakan tidak langsung merespon jika terjadi bencana.

Dari kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; *pertama*, bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi penanggulangan bencana khususnya dalam *emergency response*. *Kedua*, Koordinasi ditingkatkan pada koordinasi satu payung komando, agar tidak mengakibatkan tumpang tindih di lapangan. *Ketiga*, setiap instansi penanggulangan bencana berinisiatif memasukan perwakilan di BPBD agar terjadi koordinasi, komunikasi, informasi dan kerjasama yang baik antar insitusi. *Keempat*, BPBD maupun BNPB di tingkat nasional mempunyai perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam kaitan manajemen komunikasi bencana. *Lima*, BPBD harus mulai meningkatkan hubungan komunikasi tidak hanya pada institusi penanggulangan bencana, namun juga dengan dinas-dinas yang mempunyai kaitan dengan kebencanaan langsung, seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas pertanian dan peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, Setio, 2012, “Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama)”, *Jurnal Komunikasi* Vol. 1, No. 4, pp 363-372

Creswell, John W (2014), *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S, (eds)(2009), *Handbooks of Qualitative Research*, (penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Haddow, George D dan Haddow Kim S, 2009, *Disaster Communications in a Changing Media World*, Elsevier, United Kingdom

Herdiansyah, Haris, (2013), *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, Rajawali Press, Jakarta.

Hizbaron, Hadmoko, DS., Samodra, G., Dalimunthe S.A., Sartohadi, J, 2010, “Tinjauan Kerentanan, Resiko, dan Zonasi Rawan Bahaya *Rockfall* di Kulonprogo Yogyakarta”, *Forum Geografi*, Vol. 24, No. 2, pp 119-136.

Indriana, Rina Dwi, 2008, “Analisis Sudut Kemiringan Lempeng Subduksi di Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur Berdasarkan Anomali Gravitasi dan Implikasi Tektonik Vulkanik”, *Berkala Fisika*, Vol. 11, No. 3, pp. 89-96

Listyaningsuh, Umi., Giyarsih, Rum Sri., Budiani, Rahayu Sri, 2013, *Aspek Sosial Banjir Lahar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Nurjanah. Sugiharto R, Kuswanda D, BP Siswanto, Adikoesoemo, 2013, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Jakarta.

Nurwidyanto, M. Irham., Indriana, Rina Dwi., Darwis, Zukhrufuddin Thaha, 2007, "Pemodelan Zonda Sesar Opak di Daerah Pleret Bantul Yogyakarta dengan Metode Gravitasi", *Berkala Fisika*, Vol. 10, No.1, pp 65-70

Pearlson, Keri E dan Saunders, Carol S, 2010, *Managing and Using Information System : a Statagic Approach*, Wiley, USA.

Permana, Septian Aji., Setyowati, Dewi Liesnoor., Slamet, Ahmad dan Juhadi, 2017. *Panduan Pendidikan Kebencanaan Berbasis Petuah Merapi*, Carpulis Press, Yogyakarta

Ruben, Brent D dan Steward, Lea P, 2013, *Komunikasi dan Perilaku Manusia* (Penerjemah Ibnu Hamad), Rajawali Press, Jakarta

Shaw, Rajib dan Gupta, Manu, 2009, dalam Shaw, Rajib., Gupta, Manu., Sharma, Anshu (ed), *Information, Education, and Communication for Urban Risk Reduction*, Emerald, United Kingdom

Sulistiyorini, Wiwik, 2001. *Anugerah Gunung Merapi*, Mediatama Press, Surakarta

Suprpto, Edi (2010), *Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan*, Disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Pengurangan Emisi Karbon dari Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Secara Lestari dan Berkelanjutan, Jakarta

Tiwari, Asmita, (2015), *The Capacity Crisis in Disaster Risk Management*, SPRINGER, USA

UNISDR, 2009, *Terminology on Disaster Risk Reduction*, United Nation, USA

Yin, Robert, k, (2006), *Studi Kasus, Desain dan Metode*, (Penerjemah M. Djauzi Mudzakir), Rajawali Press, Jakarta